

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2021 tercatat sebesar 0,84% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2020 yang tercatat 0,80% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga di sebagian kelompok barang, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau. Namun demikian realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama 1,37% (yoy). Selanjutnya, inflasi pada triwulan II 2021 diperkirakan naik lebih tinggi, didorong oleh adanya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Namun demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Wilayah Bali, terus mengawal pergerakan harga di sepanjang triwulan II 2021. Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2021 tercatat sebesar 0,84% (yoy), lebih tinggi dibanding dengan triwulan sebelumnya (0,80%, yoy). Peningkatan inflasi disebabkan oleh naiknya tekanan harga cabai rawit, daging babi, cabai merah, tempe, dan minyak goreng. Harga cabai merah dan cabai rawit meningkat sejalan dengan tingginya curah hujan di triwulan I 2021 yang menyebabkan kuantitas dan kualitas panen menurun. Selain itu, tingginya curah hujan akibat La Nina di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 juga menyebabkan penanaman aneka cabai tidak optimal. Selanjutnya, harga daging babi masih menunjukkan tren peningkatan, disebabkan oleh shortage supply pasca wabah African Swine Fever (ASF) yang terjadi pada awal tahun 2020. Hingga saat ini, Dinas Peternakan masih belum dapat mengembalikan jumlah ternak kembali ke level sebelum wabah, meskipun berbagai langkah telah dilakukan seperti inseminasi buatan. Lebih lanjut, adanya Hari Raya Nyepi di triwulan I juga menyebabkan peningkatan permintaan, sehingga mendorong harga daging babi lebih tinggi. Peningkatan harga tempe disebabkan oleh tingginya harga kedelai di pasar global, bersumber dari turunnya pasokan kedelai global akibat anomali cuaca yang menyebabkan gagal panen, yang disertai dengan peningkatan demand, utamanya dari Tiongkok. Peningkatan ini bersumber dari tingginya kebutuhan pakan ternak babi sejalan dengan upaya pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan jumlah ternak pasca wabah ASF. Adapun peningkatan harga minyak goreng disebabkan oleh naiknya harga CPO dunia, juga disebabkan oleh turunnya pasokan. Namun demikian, peningkatan harga lebih lanjut tertahan oleh turunnya harga komoditas daging ayam ras, pisang, canang sari, bawang putih, dan telur ayam ras. Penurunan harga daging ayam dan telur ayam ras sejalan dengan normalisasi pasokan pasca kebijakan cutting HE serta himbauan dan upaya TPID agar pedagang dan distributor menurunkan harga. Selanjutnya, penurunan harga canang sari dan pisang sejalan dengan mulai turunnya permintaan pasca berakhirnya berbagai kegiatan upacara keagamaan di akhir tahun 2020.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan kelompok barang, peningkatan inflasi Bali pada triwulan I 2021 disebabkan oleh peningkatan tekanan harga beberapa kelompok komoditas, dengan penurunan tertinggi berada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan dengan menurunnya pasokan komoditas hortikultura di awal tahun akibat keterbatasan pasokan. Dalam rangka memitigasi berlanjutnya tekanan harga, TPID terus berupaya mengendalikan inflasi dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Salah satu langkah yang dilakukan oleh TPID adalah mendorong petani untuk bergabung dalam marketplace untuk dapat langsung memasarkan hasil komoditasnya serta mengadakan berbagai program untuk meningkatkan daya tahan hasil panen petani, seperti membangun controlled atmosphere storage (CAS).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Provinsi Bali pada triwulan I 2021 adalah sebagai berikut: a) HLM dilakukan di beberapa TPID Kabupaten di Provinsi Bali dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan yang jatuh pada bulan Maret 2021 yaitu hari raya Nyepi, Isra Miraj, Galungan dan Kuningan b) Beberapa upaya telah dilakukan TPID di Provinsi Bali dalam memenuhi pasokan pangan lokal, khususnya pengendalian harga cabai yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Bangli. TPID Kabupaten Badung mengusung program MATANABE (Masyarakat Tanam Cabe) dan SIBERTANI (Siswa Belajar Bertani). Kedua program tersebut dilakukan bekerjasama dengan BPD Bali dalam pengadaan benih cabai dan dalam penanaman melibatkan masyarakat dan siswasiswa sekolah. Sementara itu, TPID Kabupaten Bangli telah melakukan pengendalian harga cabai dengan menghimbau distributor agar menerapkan harga yang wajar. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat melakukan pemantauan ke pasar, distributor dan produsen. Upaya memberikan bimbingan teknis kepada petani cabai juga rutin dilakukan. Edukasi diberikan kepada petani cabai agar menggunakan rain shelter (atap sungkup dari plastik UV yang dipasang dengan kerangka bambu, besi dan sejenisnya) di atas pertanian cabai untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai di musim hujan. c) Upaya lainnya melalui komunikasi efektif dilakukan melalui perbaikan kualitas data dan memperkuat ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian inflasi daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Bali pada Triwulan I 2021 adalah sebagai berikut: a) Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan koordinasi dengan TPID Prov. Bali dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di seluruh daerah di Bali. b) Perlunya dibangun penataan kelembagaan yang baik, proses yang baik, dan memiliki sistem yang baik untuk bisa sustainable. Sehingga, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, tidak terjadi masalah karena sudah memiliki prioritas dan sistem yang bisa berjalan sendiri

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

-